



---

## RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018 - 2023

---



DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA PALANGKA RAYA  
Jl. G. Obos XI, Lingkar Dalam, Kota Palangka Raya



**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA**  
**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN**  
Jl. G. Obos XI (Lingkar Dalam) Telp./ Fax (0536) 3231987  
**P A L A N G K A R A Y A**

---

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN**  
**KOTA PALANGKA RAYA**

Nomor : / SK/ DKPP/ III/ 2019

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN DAN**  
**PERTANIAN KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2018-2023**

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA PALANGKA RAYA**

- Menimbang :      a. bahwa untuk memberikan gambaran mengenai wujud masa depan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya, perlu disusun Rencana Strategis yang merupakan landasan bagi semua elemen dalam organisasi untuk menentukan arah lima tahun ke depan;
- b. bahwa Rencana Strategis merupakan pedoman yang mengikat seluruh bagian dari organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya dalam kegiatan operasional sehari-hari;
- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya Tahun 2018 – 2023 dengan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya.
- Mengingat :      1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kota Pradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
4. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
12. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010–2014;
14. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 050/200/11/BANGDA/2008 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Palangka Raya Tahun 2008 – 2028;
17. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 – 2023;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk dan Mengangkat para Pejabat/ Pegawai yang namanya tersebut sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini masing – masing sebagai Tim Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018 - 2023 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Palangka Raya  
pada       Maret 2019

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN  
KOTA PALANGKA RAYA,**

**Ir. HARRY MAIHADI**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630504 199303 1 020

## LAMPIRAN

Nomor : /SK/DKPP/ III/ 2019  
Tanggal : Maret 2019  
Tentang : Penunjukan Tim Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018 – 2023

NO.	NAMA/ NIP	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	<b>Ir. HARRY MAIHADI</b> NIP. 19630504 199303 1 020	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Dinas	Ketua
2.	<b>M. REIZA INDRAWAN, SP., MMA</b> NIP.19831216 201001 1 005	Penata TK I (III/d)	Kasubag Perencanaan	Sekretaris
3.	<b>NINUNG HAWINY, S.Hut</b> NIP. 19800719 200801 2 022	Penata (III/c)	JFU Subbag Perencanaan	Anggota
4.	<b>SADAT, SH</b>	Tenaga Kontrak	JFU Subbag Perencanaan	Anggota

## KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya Tahun 2018 - 2023 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya Tahun 2018 – 2023 yang memuat visi, misi dan program pembangunan Kota Palangka Raya. Renstra disusun untuk dipergunakan sebagai acuan dan pegangan dalam rangka melaksanakan pembangunan bidang pertanian dalam menentukan langkah kebijakan dan melaksanakan kegiatan guna mencapai tujuan dan sasaran program yang dapat berjalan sesuai dengan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya. Dalam pelaksanaannya pada tahun 2019 ini, dilaksanakan review atas Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya, khususnya review terhadap target-target sasaran program disesuaikan terhadap review target-target sasaran dalam RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018 – 2023.

Atas kerjasama semua pihak, akhirnya Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya Tahun 2018 – 2023 ini dapat disusun, dan dimanfaatkan sebagai pedoman dan acuan bagi pelaksanaan pembangunan di sektor Pertanian Kota Palangka Raya

Ditetapkan di : Palangka Raya  
pada tanggal : April 2019

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN  
KOTA PALANGKA RAYA,**

**Ir. HARRY MAIHADI**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630504 199303 1 020



## DAFTAR ISI

PENETAPAN RENSTRA 2018 – 2023 .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
<b>BAB I        PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	3
1.4 Sistematika Penulisan .....	3
<b>BAB II        GAMBARAN PELAYANAN SKPD .....</b>	<b>5</b>
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD .....	5
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah .....	6
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	6
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD .....	11
<b>BAB III       PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>15</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi .....	15
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih .....	16
3.3 Telaahan Renstra K/L .....	16
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	17
3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis .....	21
<b>BAB IV        TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>24</b>
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah .....	24
<b>BAB V        STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>25</b>
<b>BAB VI        RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PENDANAAN .....</b>	<b>26</b>
<b>BAB VII       KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>28</b>
<b>BAB VIII      PENUTUP .....</b>	<b>29</b>
LAMPIRAN .....	



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya Tahun 2018 Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	6
Tabel 2.3.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	7
Tabel 2.3.2	Realisasi Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan di Kota Palangka Raya .....	8
Tabel 2.3.3	Realisasi Pelaksanaan Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner di Kota Palangka Raya .....	9
Tabel 2.3.4	Anggaran Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya Tahun 2014 - 2018 .....	11
Tabel 2.3.5	Realisasi Anggaran Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya Tahun 2014 - 2018 .....	11
Tabel 4.1.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah .....	12
Tabel 4.1.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Organisasi Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya .....	12
Tabel 5.1	Strategi dan Kebijakan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya .....	25
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya .....	28



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pencapaian tujuan suatu organisasi yang dikelola secara modern hanya dapat dicapai jika menerapkan fungsi-fungsi manajemen yang dilakukan secara baik. Salah satu fungsi manajemen adalah fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan ini dilaksanakan agar segala program dan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan sehingga tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya yang merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menerapkan fungsi perencanaan tersebut. Dan sebagai salah satu wujud penerapan fungsi perencanaan tersebut yaitu menyusun rencana strategis. Ketentuan yang mengatur tentang penyusunan Renstra diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah diamanatkan menyusun Rencana Strategi SKPD yaitu Dokumen Perencanaan SKPD untuk periode 5 (Lima) tahun. Penyusunan rencana SKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pengawasan. Sebagai dokumen teknis dalam tataran operasional, Renstra disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023.

Berdasarkan RPJMD Kota Palangka Raya tahun 2018-2023, telah ditetapkan visi Pemerintah Kota Palangka Raya sebagai berikut : **“TERWUJUDNYA KOTA PALANGKA RAYA MENJADI KOTA YANG MAJU, RUKUN, DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA”**

Berdasarkan uraian dari makna Visi tersebut dan untuk mewujudkannya dalam 5 (Lima) tahun ke depan disusunlah Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kemajuan Kota Palangka Raya Smart Environment (Lingkungan Cerdas)
2. Mewujudkan Kerukunan Seluruh Elemen Masyarakat Smart Society (Masyarakat Cerdas)
3. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Kota dan Masyarakat Daerah Pinggiran Smart Economy (Ekonomi Cerdas)

Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya ini merupakan dokumen perencanaan yang berisikan arahan visi, misi, tujuan, target, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya selama Lima tahun (2019-2023). Penyusunan Renstra ini dimaksudkan untuk menjamin konsistensi pencapaian indikator kinerja pembangunan sesuai dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya khususnya RPJMD Kota Palangka Raya tahun 2018 – 2023. Dokumen ini disusun berdasarkan analisis strategis atas potensi, peluang, permasalahan mendasar dan tantangan terkini yang dihadapi pembangunan bidang tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, prasarana, sarana dan penyuluhan pertanian, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, perbibitan dan produksi ternak serta ketahanan pangan selama lima tahun ke depan, serta sebagai acuan dan arahan bagi jajaran birokrasi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan secara menyeluruh, terintegrasi, efisien dan sinergi dengan sektor terkait lainnya.





## 1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya Tahun 2018–2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kota Pradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
4. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
12. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010–2014;
14. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 050/200/11/BANGDA/2008 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang



Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Palangka Raya Tahun 2008 – 2028;
17. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 – 2023;

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Rencana Strategi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya Tahun 2018 –2023 adalah sebagai berikut :

#### a. Maksud

Maksud disusunnya Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya adalah sebagai Pedoman dalam Penyusunan Sasaran, Program dan Kegiatan Perencanaan Pembangunan bidang tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, prasarana, sarana dan penyuluhan pertanian, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, perbibitan dan produksi ternak serta ketahanan pangan Kota Palangka Raya selama kurun waktu 5 (lima) tahun 2018 – 2023, sehingga dapat menjamin tercapainya tujuan yang ditetapkan.

#### b. Tujuan

Tujuan disusunnya Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya adalah untuk meningkatkan Pelaksanaan tugas Pemerintahan dalam bidang tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, prasarana, sarana dan penyuluhan pertanian, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, perbibitan dan produksi ternak serta ketahanan pangan, dengan memperhatikan aspirasi masyarakat sehingga lebih berdaya guna dan berhasil guna. Penyusunan Renstra juga merupakan tolak ukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi serta pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah



- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
  - 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
  - 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
  - 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
  - 3.5 Penentuan Isu – isu Strategis
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- BAB VIII : PENUTUP



## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

#### 2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya mempunyai tugas pokok penyelenggaraan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan lingkup tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, prasarana, sarana dan penyuluhan pertanian, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, perbibitan dan produksi ternak serta ketahanan pangan.

Dalam pelaksanaan tugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di bidang ketahanan pangan dan pertanian
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan dan pertanian
3. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan
5. Penyusunan program penyuluhan pertanian
6. Penataan prasarana pertanian
7. Pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman, benih/ bibit ternak dan hijauan pakan ternak
8. Pengawasan peredaran sarana pertanian
9. Pembinaan produksi di bidang pertanian
10. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan
11. Pengendalian dan penanggulangan bencana alam
12. Pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian
13. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian
14. Pemberian ijin usaha/rekomendasi teknis pertanian
15. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketahanan pangan dan pertanian dan
16. Pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Adapun susunan organisasi pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
  - Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
  - Sub Bagian Keuangan dan Aset
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Ketahanan Pangan
  - Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
  - Seksi Distribusi Cadangan Pangan dan
  - Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan
- d. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
  - Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
  - Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura
  - Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura
- e. Bidang Perkebunan
  - Seksi Produksi Perkebunan
  - Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan
  - Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan



- f. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian
  - Seksi Lahan dan Irigasi
  - Seksi Pupuk, Pestisida dan Alat dan Mesin Pertanian
  - Seksi Penyuluhan Pertanian
- g. Bidang Perbibitan dan Produksi Ternak
  - Seksi Perbibitan
  - Seksi Ruminansia
  - Seksi Non Ruminansia
- h. Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran
  - Seksi Kesehatan Hewan
  - Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner
  - Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan
- i. Unit Pelaksana Teknis
- j. Kelompok Jabatan Fungsioanal

## 2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan struktur organisasi, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya didukung oleh sumber daya aparatur yang berjumlah 92 orang PNS. Berikut disajikan komposisi pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya pada Tahun 2018 berdasar tingkat Pendidikan.

Tabel 2.1 Pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya Tahun 2018 Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan					JUMLAH
		S-1	S-2	D-III	SLTA	SLTP	
1.	Kepala Dinas	1	-				1
2.	Sekretariat	9	2	1	1	-	12
3.	Bidang TPH	9	3	2	1	-	15
4.	Bidang Ketahanan Pangan	6	3	1	1	-	11
5.	Bidang PSP	8	-	1	-	-	9
6.	Bidang Perkebunan	5	1	-	1	-	7
7.	Bidang PPT	6	1	-	2	-	9
8.	Bidang Kesmavet	8	-	-	1	-	3
9.	Kepala UPTD	3	-	-	-	1	10
10.	Penyuluh Pertanian	10	-	4	1	-	15
	<b>JUMLAH</b>	64	10	9	8	1	92

## 2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pada lima tahun terakhir, kualitas penyelenggaraan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya mengalami kondisi sebagai berikut :



Tabel 2.3.1 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA PALANGKARAYA TAHUN 2014 - 2018

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA TAHUN				REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-				RASIO CAPAIAN TAHUN KE-						
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	Produksi Tanaman Pertanian (ton)															
	1. Padi	90	113	118	124	130	95	68,80	33	8	4,6	105,56	60,88	27,97	6,45	3,54
	2. Sayuran	8.995	9.105	9.215	9.325	9.435	2.616	2.243	13.315,30	756	9.264	29,09	24,63	144,50	8,10	98,19
	3. Buah-buahan	5.935	5.960	5.985	6.010	6.035	2.153	1.858,60	9.904	5.231	8.095	36,28	31,18	165,48	87,04	134,13
	4. Karet	1.319	1.319	2.900	2.900,25	2.900,25	2.931	1.319	3.036	2.900,25	2.967,64	222,21	100,00	104,67	100,00	102,32
2	Kelapa Sawit	424,9	424,5	211	211,0	211	210	424,50	211	528,68	1.018,69	49,42	100,00	100,00	250,56	482,79
	Produktivitas Hasil Pertanian (ton/ha)															
	1. Padi	2,06	2,07	2,07	2,08	2,08	2,26	1,60	2,20	2	2,90	109,71	77,29	106,28	96,15	139,42
	2. Sayuran	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	4,08	4,04	1,99	419	1.540,64	206,06	203,83	100,40	21,118,95	77,810,10
	3. Buah-buahan	3,45	3,45	3,45	3,457	3	3,45	3,46	3,46	16,26	37,92	99,94	100,29	100,29	470,35	1.096,59
3	Karet	2.173,71	2.173,71	2.173,71	2.173,71	2.173,71	887	725,99	2.173,71	3.040,11	3.040,85	40,80	33,40	100,00	139,86	139,89
	Kelapa Sawit	1.683,14	1.683,14	1.683,14	1.683,14	1.683,14	1.209,68	1.557,08	1.683,14	4.782,10	8.079,29	71,87	92,51	100,00	284,12	480,01
	Peningkatan Produksi Peternakan															
	I. Populasi Ternak (ekor)															
	1. Sapi	1.813	1.094	2.000	2.105	2.210	1.741	1.793	1.883	1.958	2.036	96,03	163,89	94,15	93,02	92,13
4	Kerbau	39	40	42	43	44	7	9	12	12	34	17,95	22,50	28,57	27,91	77,27
	Kambing	3.072	3.226	3.384	3.553	3.730	982	1.007	1.134	1.247	1.372	31,97	31,22	33,51	35,10	36,78
	Babi	15.574	16.820	18.166	19.619	21.189	13.036	16.206	17.498	18.368	21.189	83,70	96,35	96,32	93,62	100,00
	Ayam Buras	211.264	221.827	232.918	244.562	256.790	71.218	76.876	82.257	86.403	87.698	33,71	34,66	35,32	23,06	34,15
	Ayam Broiler	1.230.366	1.353.700	1.489.070	1.637.977	1.801.757	1.277.500	2.063.825	1.429.070	1.640.377	1.801.775	103,83	152,46	95,97	100,15	100,00
5	Ayam Ras Layer	50.000	60.000	70.000	80.000	100.000	72.000	81.000	100.000	110.500	150.000	144,00	135,00	142,86	138,13	150,00
	Iritik	4.811	5.305	5.570	5.576	6.141	4.993	5.295	5.576	5.851	65,141	103,78	99,81	100,11	104,93	1.060,76
	Produksi Produk Asal Ternak (ton)															
	1. Daging Sapi	993.150	1.171.950	1.289.100	1.401.450	1.540.050	859.599	772.632	927.864	1.021.104	1.102.248	86,55	65,93	71,98	72,86	71,57
	2. Daging Kerbau	14.550	16.050	17.700	19.500	21.450	1.680	-	6.720	7.560	8.400	11,55	-	37,97	38,77	39,16
6	Daging Kambing	19.272	21.204	23.328	25.656	28.224	12.685	12.590	15.458	17.044	19.686	65,82	59,38	66,26	163,88	0,16
	Daging Babi	240.900	265.020	291.540	320.700	352.800	216.936	232.416	218.700	331.088	338	90,05	87,70	75,02	103,24	0,10
	Daging Ayam Buras	465.953	512.548	563.083	620.183	682.201	307.744	262.593	262.593	401.176	446,12	66,05	51,23	46,63	64,69	0,07
	Daging Ayam Broiler	4.336.575	4.880.233	5.368.257	5.905.083	6.495.591	3.128.028	4.582.020	4.582.020	5.789.520	5.373,04	72,13	93,89	85,35	98,04	0,08
	Daging Iritik	37.359	41.095	42.205	49.726	54.699	30.230	27.631	27.631	37.340	39,50	80,92	67,24	65,47	75,09	0,07
7	Telur Ayam Ras	562.017	574.175	585.659	597.372	609.319	911.954	1.616.942	1.616.942	2.016.625	1.884,818	162,26	281,61	276,09	337,58	309,33
	Telur Ayam Buras	365.738	371.224	376.792	382.444	388.181	323.14	540.730	540.730	162.731	170.806	8,84	145,66	143,51	42,55	44,00
	Telur Iritik	23.087	24.164	24.256	24.620	24.989	20.529	34.338	34.338	34.932	36,612	88,92	142,10	141,56	141,88	146,51
	Nilai Tukar Petani	105	108	110	112	115	108	108	108	97,60	97,89	102,86	100,00	98,18	87,14	85,12
	Skor PPH	80	82	85	87	90	86,90	88,20	91,60	89,20	90,60	108,63	107,56	107,76	102,53	100,67

## a. Bidang Pertanian

Gambaran kinerja pembangunan pertanian Kota Palangka Raya disajikan pada tabel 2.3.1. Berdasarkan tabel 2.3.1, data capaian kinerja produksi tanaman pertanian khususnya produksi tanaman pangan yaitu komoditas padi cenderung mengalami penurunan. Penurunan produksi padi tersebut sangat dipengaruhi oleh penurunan luas panen. Hal ini disebabkan karena lahan di Kota Palangka Raya yang digunakan untuk kegiatan usahatani padi bukan lahan khusus sawah tetapi sebagian besar adalah lahan gambut, rawa, dan pasir. Selain itu jika dibandingkan dengan komoditas hortikultura, pertanian tanaman padi masih belum menjadi unggulan pilihan utama bagi petani. Kendala lain petani tidak banyak menanam komoditi padi karena biaya produksinya yang besar mulai dari penanaman, pasca panen, sampai ke pemasaran, dimana khusus untuk pemasaran mayoritas konsumsi padi beras masyarakat Kota Palangka Raya masih mengkonsumsi padi beras dari daerah luar, sehingga beras hasil produksi padi lokal masih belum menjadi pilihan utama masyarakat di Kota Palangka Raya. Produksi sayuran mengalami peningkatan secara fluktuatif, dikarenakan kondisi lahan di Kota Palangkaraya lebih sesuai untuk komoditi ini, dan terbukanya pangsa pasar untuk komoditi ini. Dilihat dari produktivitas pertanian, cenderung meningkat secara fluktuatif, walaupun untuk tanaman sayur cenderung menurun tipis. Pertanian yang maju akan terlihat pada peningkatan nilai produktivitasnya. Permasalahan produktivitas pertanian di Kota Palangka Raya bersumber dari kualitas lahan. Produktivitas yang cenderung meningkat dikarenakan adanya kegiatan pengembangan tanaman pangan dan hortikultura yang bersumber dari dana APBD, APBN dan swadaya masyarakat, antara lain : adanya bantuan alat-alat pertanian, penyaluran benih/ bibit, pembangunan jalan pertanian, optimalisasi lahan , dan jalan usaha tani, serta pembinaan masyarakat pertanian. Khusus tanaman pangan, berikut digambarkan kondisi realisasi pencapaian kinerja :

Tabel 2.3.2 Realisasi Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan di Kota Palangka Raya

No.	Jenis Kegiatan	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
I.	Luas Tanam (Ha)					
	1. Padi	<b>105</b>	<b>124</b>	<b>38</b>	<b>5</b>	<b>26</b>
	a. Sawah	35	20	-	1	19,75
	b. Ladang/ Tegalan	70	104	38	4	6,25
	2. Jagung	<b>121</b>	<b>204</b>	<b>216</b>	<b>76</b>	<b>59</b>
	a. Jagung Manis	121	204	208	74	50
	b. Jagung komposit	-	-	8	2	8,5
	3. Kedelai	2	7	3	-	-
	4. Kacang Tanah	2	4	1	-	3,5
	5. Ubi Kayu	68	93	60	41	16,5
	6. Ubi Jalar	11	4	3	1	4
II.	Luas Panen (Ha)					
	1. Padi	<b>58</b>	<b>59</b>	<b>15</b>	<b>4,25</b>	<b>15</b>
	a. Sawah	8	3	-	0,25	13,75
	b. Ladang/ Tegalan	50	56	15	4	1,25
	2. Jagung	<b>77</b>	<b>149</b>	<b>183</b>	<b>73</b>	<b>56</b>
	a. Jagung Manis	77	149	179	71	48,5
	b. Jagung komposit	-	-	4	2	7,5
	3. Kedelai	-	6	2	-	-
	4. Kacang Tanah	2	3	1	-	3,5
	5. Ubi Kayu	43	48	31	39	16,5
	6. Ubi Jalar	11	4	3	1	4



III.	Produksi (Ton)					
1.	Padi	<b>122</b>	<b>130</b>	<b>33</b>	<b>8,1</b>	<b>44,2</b>
a.	Sawah	17	7	-	1,7	44
b.	Ladang/ Tegalan	105	123	33	6,4	0,2
2.	Jagung	174	287	410	104,5	391,01
a.	Jagung Manis	174	287	405	94	351,63
b.	Jagung komposit	-	-	5	10,5	39,38
3.	Kedelai	-	6	2	-	-
4.	Kacang Tanah	2	4	1	-	2,45
5.	Ubi Kayu	519	576	699	492	2.062,5
6.	Ubi Jalar	91	22	21	7	9,1
IV.	Produktivitas (Kw/Ha)					
1.	Padi	<b>21,03</b>	<b>22,03</b>	<b>22</b>	<b>19,06</b>	<b>29,47</b>
a.	Sawah	21,25	23,33	-	68	32
b.	Ladang/ Tegalan	21	21,96	22	16	1,6
2.	Jagung	<b>22,6</b>	<b>19,26</b>	<b>22,4</b>	<b>14,32</b>	<b>69,82</b>
a.	Jagung Manis	22,6	19,26	22,63	13,24	72,5
b.	Jagung komposit	-	-	12,5	52,5	52,5
3.	Kedelai	-	10	10	-	-
4.	Kacang Tanah	10	13,33	10	-	7
5.	Ubi Kayu	120,7	120	225,48	126,15	1,250
6.	Ubi Jalar	82,73	55	70	70	22,75

b. Bidang Perkebunan

Berdasarkan tabel 2.3.1, pencapaian kinerja pelayanan bidang perkebunan relatif stabil. Keberhasilan pencapaian kinerja bidang perkebunan diantaranya didukung oleh program dan kegiatan yang sangat melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam hal ini melalui Kelompok Tani (Poktan). Selain itu juga direalisasikan pula program Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yaitu Gerakan Bersama Memanfaatkan Lahan Terlantar (Geber-MLT) dengan luasan 15 Ha dan program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L) dengan luasan 15 Ha. Selain itu dilaksanakan pula pemberian bantuan bibit tanaman perkebunan ke masyarakat dengan total 27.460 batang (sawit = 17.460 batang dan karet = 10.000 batang) dan bantuan pemeliharaan kebun masyarakat seluas 4 Ha. Semua kegiatan dapat berjalan dengan cukup lancar dan diterima oleh poktan yang berhak serta telah terverifikasi.

c. Bidang Ketahanan Pangan

Hasil yang dicapai dari bidang ketahanan Pangan kurun waktu tahun 2014 s.d 2018, yaitu pencapaian skor PPH (Pola Pangan Harapan) seperti tergambar data pada tabel 2.3.1. Skor PPH Kota Palangka Raya dari Tahun 2014 – 2018 cenderung meningkat namun belum mencapai standar nasional sebesar 90. Situasi seperti ini terjadi karena pola konsumsi Pangan masyarakat yang kurang beragam, bergizi seimbang serta diikuti dengan semakin meningkatnya konsumsi terhadap produk import antara lain gandum dan terigu. Sementara itu konsumsi terhadap pangan lainnya dinilai masih belum memenuhi komposisi ideal yang dianjurkan seperti kelompok umbi, pangan hewani, sayur dan aneka buah.

d. Bidang Peternakan

Data capaian kinerja peningkatan populasi serta produksi ternak dapat dilihat pada tabel diatas. Populasi ternak sapi mengalami kenaikan setiap tahunnya, salah satu factor pendukungnya





adalah Kondisi Sumber Daya Alam di Kota Palangka Raya yang cukup potensial, mengingat luasnya lahan yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan peternakan. Potensi ini sangat baik untuk menjadikan Palangka Raya sebagai lumbung ternak besar seperti sapi maupun kambing. Populasi Babi dan ayam broiler menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, dikarenakan modal yang dibutuhkan cukup fleksibel, dan masih terbukanya peluang pasar, disamping itu juga ditunjang oleh kegiatan kegiatan yang mendukung pengoptimalan populasi tersebut, diantaranya adalah bantuan bibit ternak yang disalurkan kepada masyarakat. Ternak babi juga termasuk hewan Polytocus (beranak banyak) sehingga perkembangan populasinya lebih cepat dibanding komoditas ternak lain. Populasi Ayam broiler juga mengalami peningkatan, dikarenakan pengusaha ayam broiler mulai melirik prospek komoditi ini.

e. Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan pembangunan kesehatan hewan dan masyarakat veteriner kurun waktu tahun 2014 s.d 2018 seperti tercantum pada tabel dibawah

Tabel 2.3.3 Realisasi Pelaksanaan Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner di Kota Palangka Raya

No.	Jenis Kegiatan	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Pemberian Vaksin Hewan (Dosis)	6.147	5.839	7.688	6.667	6.000
2.	Surveillance Avian Influenza (Sampel)	450	500	500	500	550
3.	Pemeriksaan Sampel Produk Asal ternak (Sampel)	70	70	70	70	150

f. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian

Untuk lebih meningkatkan pengembangan usaha sektor pertanian, Peternakan dan Perkebunan diperlukan sumberdaya manusia yang berkualitas, andal serta berkemampuan manajerial, kewirausahaan dan menguasai manajemen bisnis sehingga pelaku pengembangan usaha Pertanian, Perkebunan, Peternakan tersebut mampu membangun usaha dari hulu sampai ke hilir yang berdaya saing dan mampu berperan serta dalam melestarikan hutan dan Lingkungan hidup sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, karena itu, untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah berkewajiban menyelenggarakan penyuluhan di Bidang Pertanian, Peternakan dan Perkebunan dengan tenaga Fungsional Penyuluh yang andal dan berkualitas. Untuk Lebih meningkatkan Penyelenggaraan Penyuluhan maka Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya juga melakukan pembinaan dan mendampingi kelompok – kelompok tani yang ada di Kota Palangka Raya. Untuk memaksimalkan Penyelenggaraan Penyuluhan maka Pemerintah Kota Palangka Raya membentuk Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K). Agar penyelenggaraan penyuluhan dapat optimal sampai kelurahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan pasal 16 mengenai Pos Penyuluhan sebagai tempat pertemuan para penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha dimana Kota Palangka Raya baru memiliki 14 Pos Penyuluhan sedangkan idealnya 1 kelurahan memiliki 1 Pos Penyuluhan.



Dalam pencapaian pelaksanaan target capaian pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, anggaran menjadi salah satu faktor penting yang harus disiapkan. Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya tahun 2014 – 2018 seperti tertuang pada tabel berikut

Tabel 2.3.4 Anggaran Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya Tahun 2014 - 2018

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-				
	2014	2015	2016	2017	2018
<b>PENDAPATAN</b>				196.650.000,00	250.282.000,00
<b>BELANJA DAERAH</b>			<b>17.263.895.163,60</b>	<b>26.042.819.433,70</b>	<b>18.232.237.838,39</b>
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>			<b>7.648.031.081,70</b>	<b>9.268.031.081,70</b>	<b>8.358.227.013,39</b>
Belanja Pegawai			7.648.031.081,70	9.268.031.081,70	8.358.227.013,39
<b>BELANJA LANGSUNG</b>			<b>9.615.864.081,90</b>	<b>16.774.788.352,00</b>	<b>9.874.010.825,00</b>
Belanja Pegawai			491.456.550,00	1.211.910.550,00	1.210.792.250,00
Belanja Barang dan Jasa			5.835.139.231,90	7.531.021.802,00	5.151.958.575,00
Belanja Modal			3.289.268.300,00	8.031.856.000,00	3.511.260.000,00

Tabel 2.3.5 Realisasi Anggaran Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya Tahun 2014 - 2018

URAIAN	REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-				
	2014	2015	2016	2017	2018
<b>PENDAPATAN</b>				188.475.000,00	200.215.000,00
<b>BELANJA DAERAH</b>	-	-	<b>16.412.067.727,00</b>	<b>26.692.288.537,00</b>	<b>15.276.686.182,00</b>
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	-	-	<b>7.184.061.467,00</b>	<b>7.408.539.698,00</b>	<b>7.832.071.515,00</b>
Belanja Pegawai					
<b>BELANJA LANGSUNG</b>	-	-	<b>9.228.006.260,00</b>	<b>19.283.748.839,00</b>	<b>7.444.614.667,00</b>
Belanja Pegawai					
Belanja Barang dan Jasa					
Belanja Modal					



Tabel 2.3.6 Rasio antara Realisasi dan Anggaran Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya Tahun 2014 - 2018

URAIAN	RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-				
	2014	2015	2016	2017	2018
<b>PENDAPATAN</b>	-	-	-	95,84	80,00
<b>BELANJA DAERAH</b>	-	-	95,07	96,97	95,50
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b> Belanja Pegawai	-	-	93,93	95,73	94,84
<b>BELANJA LANGSUNG</b> Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal	-	-	95,97	97,46	96,21

## 2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

### A. TANTANGAN

1. Tantangan yang dihadapi dalam bidang pertanian ke depan adalah bagaimana menyediakan semua prasarana berupa jalan usahatani, jalan produksi, laboratorium dan kebun percobaan bagi penelitian, pelayanan uji standar dan mutu, kebun untuk penangkaran benih dan bibit, klinik konsultasi kesehatan tanaman, balai informasi dan promosi pertanian, pasar-pasar yang spesifik bagi komoditas yang dibutuhkan petani dalam jumlah yang cukup, berada dekat dengan sentra produksi dan biaya pelayanan yang terjangkau.
2. Tantangan untuk mengembangkan sarana produksi pertanian ke depan adalah bagaimana mengembangkan penangkar benih/ bibit unggul dan bermutu, menumbuhkan kembangkan kelembagaan penyedia jasa alat dan mesin pertanian, mendorong petani memproduksi dan meningkatkan pemakaian pupuk organik, serta mendorong petani untuk menggunakan pestisida dan obat-obatan tanaman/ hewan yang ramah lingkungan.
3. Tantangan ke depan untuk mengatasi dan mengantisipasi degradasi sumber daya lahan adalah bagaimana melakukan rehabilitasi dan konservasi lahan secara teknis dan biologis (vegetatif) melalui penerapan teknologi budidaya pertanian yang ramah lingkungan serta pengaturan dan pengendalian tata ruang kawasan.
4. Tantangan untuk mengembangkan kapasitas dan kelembagaan petani ke depan adalah bagaimana lembaga petani ini untuk merevitalisasi diri dari kelembagaan yang saat ini lebih dominan hanya sebagai wadah pembinaan teknis dan sosial menjadi kelembagaan yang juga berfungsi sebagai wadah pengembangan usaha yang berbadan hukum atau dapat berintegrasi dalam koperasi yang ada di pedesaan.
5. Tantangan ke depan yang harus dihadapi terhadap kondisi masih lemahnya ketahanan pangan adalah bagaimana membangun kelembagaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) masyarakat, terutama di daerah-daerah rawan pangan. Selain itu pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan lumbung pangan, pola-pola integrasi komoditas, pengendalian hama terpadu maupun pengenalan iklim diharapkan dapat membantu



masyarakat dari gagal panen yang dapat mengakibatkan menurunnya kemampuan rumah tangga petani untuk memperoleh bahan pangan.

6. Kualitas sumber daya manusia/ Petani/ masyarakat masih rendah
7. Tantangan terhadap keterbatasan sumber daya manusia adalah bagaimana meningkatkan jumlah dan kemampuan/ ketrampilan aparatur dan masyarakat.
8. Kurangnya minat dan kesadaran masyarakat untuk berusaha di bidang Pertanian.
9. Kurangnya SDM Aparatur khususnya Penyuluh
10. Harga pangan di tingkat Petani masih rendah
11. Mobilitas dan akses jalan sebagai akses distribusi pangan belum memadai
12. Kurangnya Pengetahuan Masyarakat tentang konsumsi Pangan yang bermutu, beragam, bergizi dan Aman
13. Produksi Pangan Lokal masih rendah, masih banyak yang didatangkan dari luar daerah.
14. Teknologi lanjutan Pengelolaan hasil pangan masih rendah
15. Sarana dan prasarana DKPP belum memadai
16. Tantangan untuk mengembangkan produksi, peningkatan populasi peternakan adalah bagaimana mengembangkan pembenihan/ pembibitan unggul dan bermutu melalui pengembangan teknologi reproduksi, menumbuh kembangkan kelembagaan penyedia jasa alat dan mesin, teknologi pakan ternak.
17. Tantangan untuk memenuhi kebutuhan pangan hewani yang sebagian besar masih dipasok dari luar daerah adalah melalui penyediaan bahan baku ternak potong dengan mendatangkan pihak ketiga/ investor.
18. Tantangan ke depan yang harus dihadapi terhadap kondisi masih lemahnya pengolahan hasil peternakan adalah bagaimana menganekaragamkan dan peningkatan kualitas produk pangan hewani dan produksi hasil olahan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH).
19. Tantangan ke depan yang harus dihadapi terhadap tekanan globalisasi pasar dan liberalisasi perdagangan adalah bagaimana meningkatkan daya saing komoditas pertanian dengan karakteristik yang sesuai keinginan konsumen dan memiliki daya saing yang tinggi, baik pasar domestik, maupun pasar ekspor. Pengembangan daya saing dan ekspansi pasar komoditas ekspor tradisional harus lebih ditingkatkan, terutama pengembangan produk olahan. Selain itu, pengembangan komoditas dan produk baru yang memiliki permintaan pasar yang tinggi juga harus dirintis.
20. Tantangan terhadap semakin berkembangnya penyakit hewan adalah bagaimana melakukan pengendalian dan pemberantasan penyakit secara berkesinambungan melalui tindakan-tindakan pengamanan penyakit, meningkatkan pengawasan peredaran vaksin dan obat hewan/ikan.



**B. PELUANG**

Peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk Pengembangan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya :

1. Meningkatnya permintaan pasar terhadap hasil-hasil produksi pertanian dalam arti luas, akibat pertambahan jumlah penduduk.
2. Tumbuhnya permintaan produk pangan organik di seluruh dunia sebagai akibat dari adanya tren baru masyarakat dunia yaitu gaya hidup sehat dengan slogan “Back to Nature”.
3. Tumbuh dan berkembangnya agroindustri di tingkat lokal, regional maupun nasional;
4. Majunya ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian;
5. Masih terbuka kemungkinan untuk ditingkatkannya jalinan kerja sama seluruh pemangku kepentingan (stake holder) pembangunan pertanian;
6. Masih terbuka potensi peningkatan produksi dan produktivitas pertanian.
7. Terbukanya peluang investasi untuk hasil-hasil kebun
8. Tersedianya Potensi Sumber Daya Alam
9. Tersedianya lahan tidur dan pekarangan masyarakat
10. Adanya komitmen pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan
11. Adanya Lumbung Pangan
12. Adanya Kelompok Tani dan Gapoktan
13. Terbentuknya Balai Penyuluhan, Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di Kecamatan
14. Terbentuknya Pos – Pos Penyuluhan di beberapa kelurahan
15. Terbentuknya komisi penyuluhan Kota Palangka Raya
16. Tersedianya Teknologi Infomasi dan Komunikasi
17. Tingginya minat masyarakat berusaha di bidang peternakan. Besarnya permintaan pasar seiring dan perkembangan Kota Palangka Raya dengan laju pertumbuhan penduduk di Kota Palangka Raya yang semakin meningkat, memacu permintaan pasar terhadap produk sub sektor peternakan, sehingga peluang pasar terhadap produk komoditas ini masih sangat terbuka, dan produksi serta produktivitas hasil peternakan secara lokal semakin diminati oleh masyarakat kota Palangka Raya. Tingginya minat ini disebabkan masyarakat menyadari berusaha peternakan dapat menjadi salah satu usaha untuk pemberdayaan ekonomi keluarga, disamping usaha ini tidak perlu menyita waktu usaha lain.
18. Pengembangan potensi lahan pengembangan peternakan di Kota Palangka Raya. Di Kota Palangka Raya arah pengembangan kawasan peternakan dilakukan di beberapa lokasi. Kawasan peternakan difokuskan untuk pengembangan usaha ternak sapi potong yang berlokasi di Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Rakumpit.
19. Semakin berkembangnya kelembagaan pembudidaya dan usaha peternakan. Di daerah produksi peternakan di Kota Palangka Raya dijumpai beberapa lembaga peternakan dari masyarakat. Kelembagaan tersebut dapat berupa usaha perorangan, persekutuan, perseroan dan koperasi. Untuk itu sebagai upaya pemerintah untuk memacu dan mengembangkan kelembagaan diperlukan pembinaan, pelatihan dan kursus singkat serta monitoring evaluasi perkembangan kelembagaan di wilayah Kota Palangka Raya.
20. Maju dan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi bidang peternakan;
21. Berkembangnya sentra perbibitan dan pembenihan ternak masyarakat.



### BAB III

#### PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA PALANGKA RAYA

Pembangunan pertanian kedepan masih tetap memfokuskan kepada upaya peningkatan produksi dan produktivitas hasil pertanian. Berbagai kendala yang masih menjadi faktor pembatas dan menjadi isu strategis dalam membangun pertanian kedepan juga menjadi perhatian yang harus diselesaikan, antara lain komoditas pertanian hortikultura terutama komoditas bawang dan cabe yang masih menjadi faktor penyumbang terjadinya inflasi. Selain itu kemampuan permodalan kelompok tani yang masih kurang, Kelembagaan Petani (Kelompok Tani dan Koperasi Tani) masih belum optimal, masih perlunya peningkatan kapasitas aparat pertanian dalam mengawal teknologi, demikian pula ketersediaan benih unggul bermutu dan sarana produksi di tingkat petani masih belum memenuhi. Sarana dan prasarana seperti jalan usaha tani dan jaringan pengairan di tingkat usaha tani masih belum memadai, ketersediaan alat mesin pertanian (alsintan) belum mencukupi kebutuhan, pola kemitraan antar kelompok tani dengan swasta/ investor serta Informasi pembangunan pertanian dan investasi masih sangat perlu dilakukan penataan kearah pengelolaan yang baik. Untuk mereduksi kondisi tersebut maka diperlukan program dan kegiatan yang diharapkan akan menjawab semua permasalahan dan upaya untuk membangun pertanian kedepan yang antara lain peningkatan produksi maupun produktivitas, mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan di sentra produksi, meningkatkan kemampuan permodalan kelompok tani, meningkatkan Pengetahuan, Sikap, Keterampilan Petani dan pelaku usaha agribisnis serta aparat, menjalin kerjasama/ bermitra dengan pemodal/ pengusaha maupun perbankan.

Permasalahan tersebut terjadi karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain :

1. Diversifikasi yang belum berjalan secara progresif sehingga tekanan kebutuhan terhadap beras sebagai bahan pangan utama semakin besar.
2. Alih fungsi lahan pangan ke non pangan yang belum terkendali dengan baik terutama pada lahan
3. Sistem Agribisnis dan jiwa kewirausahaan petani yang belum berjalan dengan baik.
4. Keseimbangan ekosistem yang terganggu, sehingga sering terjadi serangan hama/penyakit.
5. Ketersediaan sarana dan prasarana bidang Pertanian masih kurang dan relatif terbatas.
6. SDM Penyuluh pertanian masih belum optimal dalam mewujudkan profesionalisme seorang penyuluh yang kreatif, inovatif dan berwawasan global.
7. Masih kurangnya dukungan dan lemahnya kelembagaan penyuluh pertanian.
8. Belum optimalnya jumlah dan kompetensi penyuluh.
9. Belum diterapkan sepenuhnya informasi, inovasi dan teknologi yang dapat mendukung petani dalam mengembangkan sistem pertanian.

#### 3.2 TELAAH VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Kota Palangka Raya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berpedoman pada visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode 2018 – 2023. Visi Kota Palangka Raya sesuai RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018 – 2023



adalah **Terwujudnya Kota Palangka Raya Menjadi Kota Yang Maju, Rukun Dan Sejahtera Untuk Semua.**

Misi merupakan penjabaran dari visi dan disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi tersebut. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Berdasarkan RPJMD Kota Palangka Raya 2018 – 2023 yang merupakan dasar penetapan dan pencapaian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, dan untuk mewujudkan visi, maka keterkaitan dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya dalam pelaksanaan visi tersebut adalah **Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Kota dan Masyarakat Daerah Pinggiran Smart Economy (Ekonomi cerdas).**

### 3.3 TELAAH RENSTRA K/L

Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah bagian dari Rencana Kerja Pemerintah Pusat, yang dituangkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2020 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPP) 2005-2025. Pembangunan Pertanian secara nasional dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian. Dimana dalam membangun pertanian Indonesia, Kementerian Pertanian melakukan visi :

1. Mewujudkan ketahanan pangan dan gizi adalah melaksanakan pembangunan dalam rangka meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan sebagai pemenuhan konsumsi pangan dan gizi masyarakat.
2. Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian adalah mendorong komoditas pertanian memiliki keunggulan bersaing dan nilai yang lebih baik dari hasil produksi, penyimpanan, pengolahan dan distribusi.
3. Mewujudkan kesejahteraan petani adalah Meningkatkan kesejahteraan petani dengan melakukan perlindungan dan pemberdayaan petani.
4. Mewujudkan Kementerian Pertanian yang transparan, akuntabel, profesional dan berintegritas tinggi adalah Meningkatkan tatakelola organisasi Kementerian Pertanian dalam mewujudkan organisasi yang transparan, akuntabel, professional dan berintegritas tinggi dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Sebagai penjabaran dari makna Misi Kementerian Pertanian, maka tujuan pembangunan pertanian yang ingin dicapai yaitu :

1. Terwujudnya swasembada padi jagung, kedelai serta meningkatnya produksi daging dan gula.
2. Terpenuhinya akses pangan masyarakat terhadap pangan.
3. Bergesernya budaya konsumsi pangan.
4. Meningkatnya stabilisasi produksi dalam rangka stabilisasi harga.
5. Berkembangnya komoditas pertanian bernilai ekonomi.
6. Mendorong majunya agrobioindustri.
7. Meningkatnya kualitas dan pendapatan petani.
8. Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pertanian



Berikut disampaikan tabel perbandingan misi RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah dan Kota Palangka Raya :

Tabel 3.3.1 Kesesuaian dan konsistensi antara Misi RPJMD Kota Palangka Raya dengan Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018-2023

No	MISI RPJMD PROVINSI KALIMANTANTENGAH	MISI RPJMD KOTA PALANGKARAYA
1	<b>Misi 1 :</b> Pemantapan Tata Ruang Wilayah Provinsi	<b>Misi 1 :</b> Mewujudkan Kemajuan Kota Palangka Raya <i>SmartEnvironment</i> (Lingkungan Cerdas)
2	<b>Misi 2 :</b> Pengelolaan Infrastruktur	<b>Misi 1 :</b> Mewujudkan Kemajuan Kota Palangka Raya <i>Smart Environment</i> (Lingkungan Cerdas)
3	<b>Misi 3 :</b> Pengelolaan	<b>Misi 1 :</b> Mewujudkan Kemajuan Kota Palangka Raya <i>Smart Environment</i> (Lingkungan Cerdas)
4	<b>Misi 4 :</b> Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengentasan Kemiskinan	<b>Misi 3 :</b> Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Kota dan Masyarakat Daerah Pinggiran <i>Smart Economy</i> (Ekonomi Cerdas)
5	<b>Misi 5 :</b> Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah	<b>Misi 2 :</b> Mewujudkan Kerukunan Seluruh Elemen Masyarakat <i>Smart Society</i> (Masyarakat Cerdas)
6	<b>Misi 6 :</b> Peningkatan Pendidikan, Kesehatan dan Pariwisata	<b>Misi 2 :</b> Mewujudkan Kerukunan Seluruh Elemen Masyarakat <i>Smart Society</i> (Masyarakat Cerdas) <b>Misi 3 :</b> Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Kota dan Masyarakat Daerah Pinggiran <i>Smart Economy</i> (Ekonomi Cerdas)
7	<b>Misi 7 :</b> Pengelolaan Lingkungan Hidup & Sumber Daya Alam	<b>Misi 1 :</b> Mewujudkan Kemajuan Kota Palangka Raya <i>Smart Environment</i> (Lingkungan Cerdas)
8	<b>Misi 8 :</b> Pengelolaan Pendapatan Daerah	<b>Misi 3 :</b> Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Kota dan Masyarakat Daerah Pinggiran <i>Smart Economy</i> (Ekonomi Cerdas)

### 3.4 TELAHAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana tata ruang wilayah provinsi Kalimantan tengah tahun 2015 – 2035. Ruang Lingkup Penataan Ruang Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah berada di Palangka Raya. Posisi geografis Provinsi Kalimantan Tengah terletak diantara 0°45' Lintang Utara -3°30'Lintang Selatan dan 110°45 Bujur Timur -115°51 Bujur Timur. Terletak diantara tiga provinsi tetangga yaitu Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Selatan. Luas wilayah administrasi Provinsi Kalimantan Tengah adalah 15.514.811,71 Ha atau 155.148,11 km<sup>2</sup>. Dengan sebelas sungai besar dan tidak kurang dari 33 sungai kecil/anak sungai, keberadaannya menjadi salah satu ciri khas Provinsi Kalimantan Tengah. Sungai Barito dengan panjang mencapai 900 km dengan kedalaman berkisar antara 6 hingga 14 m, merupakan sungai terpanjang dan dapat dilayari hingga 700 km. Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002, secara administratif wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dimekarkan sehingga menjadi 13 (tiga belas) Kabupaten dan 1 (satu) Kota yang dalam perkembangannya s/d tahun 2015 terdiri dari 136 Kecamatan dan 1.569 Desa/ Kelurahan





Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 Pasal 28 mengenai Kawasan budidaya provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b terdiri atas Non kawasan hutan seluas  $\pm 2.629.779$  Ha dengan peruntukan sebagai berikut :

- 1) Kawasan peruntukan pertanian meliputi :
  - a. Kawasan pertanian tanaman pangan (lahan sawah) dengan luas  $\pm 187.814,65$  Ha tersebar di 14 Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Tengah;
  - b. Kawasan Pencadangan lahan tanaman pangan dengan luas 178.572,86 Ha dimana didalamnya terdapat lahan pencadangan tanaman pangan seluas  $\pm 64.001,81$  Ha, tersebar di 14 Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Tengah;
  - c. Kawasan Lahan untuk Pengembangan Hortikultura seluas  $\pm 37,385$  Ha tersebar di 14 Kabupaten/ Kota;
  - d. Kawasan Tanah Adat merupakan ruang kelola masyarakat Adat program “Dayak Misik”, sejalan dengan program “Kalteng Besuh” yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas 900.000 Ha;
- 2) Kawasan Peternakan yang tersebar di 14 Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.

Penerapan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) dalam penataan ruang juga bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan atau instrumen pengelolaan lingkungan lainnya, menciptakan tata pengaturan yang lebih baik melalui pembangunan keterlibatan para pemangku kepentingan yang strategis dan partisipatif, kerjasama lintas batas wilayah administrasi, serta memperkuat pendekatan kesatuan.

Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 67 Tahun 2012 tentang pedoman Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan atau evaluasi rencana pembangunan daerah. Pembangunan berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Tengah, didasarkan pada tiga muatan strategis, yaitu lanskap berkelanjutan, ekonomi hijau dan strategi pembangunan rendah emisi (SPRE). Berdasarkan prakiraan dampak 10 KRP prioritas RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021 terhadap 6 isu strategis, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan masuk pada KRP 1 “Penuntasan pembangunan jalan lintas Kalimantan” yang mana isu strategis utamanya adalah isu alih fungsi lahan dan kebakaran hutan dan lahan. Jika memperhatikan lintasan jalan berdasarkan tutupan lahan, maka rencana lintasan tersebut pada umumnya melewati kawasan dengan aktivitas pertanian dan perkebunan masyarakat (83%). Namun, pembangunan jalan seringkali diikuti dengan pembukaan lahan untuk berbagai kepentingan, salah satunya adalah untuk kegiatan pertanian dan perkebunan. Kebiasaan masyarakat untuk membuka lahan dan persiapan lahan untuk tanam adalah dengan cara tebas-bakar, dan dengan demikian akan meningkatkan kebakaran lahan dan hutan apabila ladang pertanian berdekatan dengan kawasan hutan. Hal ini diperkirakan akan mengancam kawasan bernilai konservasi tinggi. Terjadinya kebakaran hutan dan lahan akibat pembukaan hutan dan pembersihan lahan menyebabkan lanskap menjadi terbuka sehingga makin memperbesar kemungkinan terjadinya erosi tanah, dan dengan demikian, meningkatkan laju sedimentasi sungai. Adapun adaptasi yang dapat dilakukan yaitu dengan pengembangan pertanian tanpa bakar, serta penerapan teknik konservasi tanah dan air (terasering, sistem pertanian berkontur). Rekomendasi untuk KRP 1, antara lain : 1) Perlu penguatan kapasitas petani dalam penerapan pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB) termasuk insentif pendorongnya; 2) Perlu panduan teknik konservasi tanah dan air



menggunakan sistem kontur dan terasering; 3) Perlu penyusunan panduan praktis untuk penyiapan lahan tanpa bakar dan mekanisme dini pencegahan kebakaran lahan dan hutan.

Selain KRP 1 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan juga masuk pada KRP 6 “Peningkatan produksi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan maupun kehutanan pada lahan PIPPIB, Gambut Dalam, PIAPS, dan wilayah adat ditentukan melalui peta usulan kawasan pertanian dan perkebunan di kawasan PIPPIB, Gambut Dalam, PIAPS, wilayah adat di provinsi Kalimantan tengah. Meskipun pencapaian produksi 853.000 ton tahun 2014 memberikan surplus padi, namun Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berobsesi untuk mencapai produksi 1 juta ton. Untuk mencapai obsesi tersebut, maka dilakukan intensifikasi produksi padi khususnya di sentra-sentra produksi padi di Kabupaten Kapuas, Pulang Pisau, Kotawaringin Timur. Disamping program intensifikasi, direncanakan pula perluasan areal tanam (ekstensifikasi) khususnya pada padi sawah.

KRP 6 yang dilakukan melalui cara ekstensifikasi perlu mendapat perhatian mengingat kegiatan pembukaan lahan seringkali dilakukan dengan cara bakar. Kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2015 mencapai hampir 577.559 ha pada umumnya berada di kawasan lahan gambut. Ekstensifikasi lahan padi sawah di daerah rawa gambut pasang surut (tidal peat swamp) perlu dilakukan dengan kehati-hatian. Pembuatan saluran irigasi di daerah rawa gambut pasang surut, disamping berfungsi sebagai saluran pengairan, juga berfungsi sebagai saluran drainase. Pada musim kemarau, pada saat muka air tanah sangat rendah, maka saluran drainase ini akan mendorong keluarnya air dari lahan gambut sehingga menyebabkan permukaan tanah gambut menjadi cepat kering. Kondisi ini akan meningkatkan peluang terjadinya kebakaran lahan gambut. Pembuatan saluran irigasi/drainase pada kawasan persawahan rawa gambut pasang surut juga membuka akses masyarakat terhadap kawasan tersebut.

Adapun Mitigasi dari KRP 6 yakni Penetapan konservasi kawasan hutan menjadi kawasan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan tetap harus memperhatikan kawasan bernilai konservasi tinggi (kawasan NKT) dan area kelola masyarakat lokal/adat. Sedangkan untuk adaptasinya dengan pemberian insentif kepada petani tanaman pangan khususnya padi sawah agar tidak terjadi alih fungsi lahan dari tanaman pangan ke perkebunan. Rekomendasi untuk KRP 6 antara lain: 1) Tidak melakukan konservasi kawasan hutan menjadi lahan perlindungan lahan pertanian pangan di kawasan NKT dan area kelola masyarakat lokal/ adat; 2) Penyediaan subsidi untuk pengadaan sarana produksi padi dan fasilitasi pemasaran hasil panen kepada petani; 3) Peningkatan produktivitas padi khususnya padi gogo (padi lahan kering) dengan penerapan teknik budidaya yang baik (good agricultural practices); 4) Peningkatan produktivitas pertanian dan perkebunan pada kawasan NKT rendah.

Dalam rangka mewujudkan Strategi Pembangunan Rendah Emisi (SPRE) di Provinsi Kalimantan Tengah, dikembangkan kriteria khusus untuk mewujudkan SPRE yang telah disepakati dalam upaya meningkatkan penyerapan emisi karbon (peningkatan stok karbon) dengan cara meningkatkan tutupan lahan yang akan terjadi 20 tahun dengan mempertimbangkan 4 kriteria khusus salah satunya yaitu wilayah gambut dengan kedalaman lebih dari 3 meter. Di Provinsi Kalimantan Tengah luas kawasan gambut dalam (lebih dari 3 meter) tersebut adalah seluas 1.675.402 ha. Kabupaten Pulang Pisau mempunyai luas gambut dalam yang terbesar, yaitu 407.834 ha. Selanjutnya kabupaten Katingan mempunyai luas gambut dalam seluas 287.168 ha. Kebijakan menjadikan gambut dalam menjadi



kawasan lindungan setempat seluas 1.675.402 ha akan berpotensi menyimpan karbon sebesar 235.199.733 ton karbon.

Rencana tata ruang wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman didalam melaksanakan kegiatan yang menggunakan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Sedangkan untuk dokumen perencanaan pembangunan masih perlu sinergi terhadap kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) agar kebijakan pembangunan bidang pertanian dan peternakan menjadi salah satu ujung tombak penciptaan green economy yang tentu selaras dengan isu-isu lingkungan hidup.

KLHS untuk bidang pertanian dan peternakan, merupakan sebuah kajian yang sangat penting dan strategis dalam rangka pelestarian lingkungan hidup serta dampaknya bagi lingkungan di masyarakat, sehingga RTRW bidang pertanian dan peternakan yang didasarkan pada KLHS, akan menjadi kawasan pertanian dan peternakan yang didasari oleh kajian dan telaah yang mendukung kelestarian lingkungan hidup serta kelayakan, sesuai dengan analisa dampak lingkungan (AMDAL).

Beberapa hal yang menjadi faktor penghambat dalam rangka pelayanan pembangunan Pertanian dan Peternakan di Kalimantan tengah, bila ditinjau dari sisi Tata Ruang Wilayah, antara lain :

- a. Belum tertatanya kawasan pengembangan Pertanian dan Peternakan yang telah sesuai dengan tata ruang wilayah, sehingga belum adanya kawasan yang terintegrasi secara spesifik dan terpadu untuk pengembangan Kawasan Pertanian dan Peternakan secara Regulasi.
- b. Belum optimalnya pengembangan kawasan yang memiliki potensi untuk komoditi spesifik, sehingga masih rendahnya tingkat produksi dan produktivitas suatu kawasan.
- c. Perlu adanya perlakuan khusus dalam pengembangan suatu Kawasan untuk dikembangkan menjadi kawasan Pertanian dan Peternakan yang ideal, disebabkan oleh faktor kondisi lahan yang tidak optimal dan marginal contohnya lahan gambut, lahan kritis, lahan terlantar.
- d. Belum padunya tata ruang wilayah untuk pengembangan Pertanian dan Peternakan, sehingga masih menimbulkan konflik di masyarakat, disebabkan tidak jelasnya batas-batas kawasan, baik antara kawasan perkebunan, pertambangan dan pertanian rakyat serta kawasan peternakan.
- e. Mempertimbangkan bahwa sebagian besar wilayah Kota Palangka Raya terdiri atas lahan gambut, maka alokasi ruang untuk pertanian, perikanan dan peternakan harus dilakukan secara hati-hati karena aktivitas pembukaan lahan gambut akan meningkatkan emisi karbon dan pada saan bersamaan mengurangi fungsi areal gambut sebagai tempat penampungan air hujan (Water retention), apabila hal ini terjadi akan mengakibatkan bencana banjir.

Adapun faktor-faktor pendorong yang dapat mempengaruhi bagi pelayanan Pembangunan Pertanian dan Peternakan ditinjau dari sisi Tata Ruang Wilayah, antara lain :

- a. Regulasi yang mengatur tata ruang wilayah, sehingga adanya tata ruang yang terpadu dan serasi.
- b. Pelaksanaan program-program terpadu di Kota Palangka Raya.
- c. Pengembangan kawasan yang terintegrasi agropolitan, P2IUSP (Penembangan Pembibitan dan Inkubator Usaha Sapi Potong) dan minapolitan menjadi kawasan yang produktif dan ekonomis.
- d. Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya pertanian.



Kegiatan bidang Ketahanan Pangan yang berhubungan dengan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis adalah pembangunan lumbung pangan. Pembangunan lumbung pangan ini bertujuan untuk menampung beras dan bahan produk lainnya pada musim-musim tertentu dan disalurkan pada saat rawan pangan.

Pembangunan lumbung pangan masyarakat dibangun di wilayah/daerah rawan pangan. Oleh karena itu lumbung pangan dibangun (lokasi) pada daerah pemukiman sesuai dengan tata ruang wilayah kecamatan/ desa. Target pembangunan lumbung pangan sebanyak 5 lumbung pangan masyarakat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu 2014 s/d 2018. Penentuan lokasi lumbung dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Membuka surat/ mengirim surat ke kecamatan (camat) sebagai calon lokasi lumbung, di mana isi surat dimaksud agar pihak pemerintah kecamatan dapat memberikan gambaran dimana/lokasi lumbung pangan dibangun.
2. Dari pihak Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya menugaskan staf untuk turun langsung ke lapangan dalam rangka menghimpun informasi dari semua pihak terkait sehubungan dengan akan dibangun lumbung pangan masyarakat desa di wilayah ini. Hal ini dimaksudkan untuk menampung aspirasi masyarakat.

Dengan melalui tahapan-tahapan tersebut sehingga apabila dibangun lumbung pangan masyarakat tidak bersentuhan dengan kawasan hutan lindung. Dalam hal ini berdirinya bangunan lumbung berdiri di atas lahan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

### 3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Pembangunan pertanian tidak terlepas dari pengembangan kawasan yang menempatkan pertanian sebagai penggerak perekonomian. Lahan, perairan umum, potensi tenaga kerja, dan basis ekonomi lokal menjadi faktor utama pengembangan pertanian. Saat ini disadari bahwa pembangunan pertanian tidak saja bertumpu di satu kawasan tetapi juga diperlukan integrasi dengan kawasan dan dukungan sarana serta prasarana yang memadai. Struktur perekonomian wilayah merupakan faktor dasar yang membedakan suatu wilayah dengan wilayah lainnya, perbedaan tersebut sangat erat kaitannya dengan kondisi dan potensi suatu wilayah dari segi fisik lingkungan, sosial ekonomi dan kelembagaan. Berangkat dari kondisi tersebut perlu disusun sebuah kerangka dasar pembangunan pertanian yang kokoh dan tangguh, artinya pembangunan yang dilakukan harus didukung oleh segenap komponen secara dinamis, ulet, dan mampu mengoptimalkan sumberdaya, modal, tenaga, serta teknologi sekaligus mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan pertanian harus berdasarkan asas 'keberlanjutan' yakni, mencakup aspek ekologis, sosial dan ekonomi.

Konsep pertanian yang berkelanjutan dapat diwujudkan dengan perencanaan wilayah yang berbasis sumberdaya alam yang ada di suatu wilayah tertentu. Konsep perencanaan mempunyai arti penting dalam pembangunan daerah karena perencanaan merupakan suatu proses persiapan secara sistematis dari rangkaian kegiatan yang akan dilakukan dalam usaha pencapaian suatu tujuan tertentu. Perencanaan pembangunan yang mencakup siapa dan bagaimana cara untuk mencapai tujuan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kondisi dan potensi sumberdaya yang dimiliki agar pelaksanaan pembangunan tersebut dapat berjalan lebih efektif dan efisien.



Secara umum bahwa sumber daya pertanian adalah potensi yang strategis untuk wilayah Kota Palangka Raya dan memiliki peranan yang sangat besar bagi perkembangan daerah Kota Palangka Raya, yang diindikasikan sektor pertanian dalam memberikan peranan dalam pembangunan daerah dan perekonomian yang harapannya mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi penduduk, sebagai sumber pendapatan, sebagai sarana untuk berusaha, serta sebagai sarana untuk dapat merubah nasib ke arah yang lebih baik lagi. Peranan pertanian/ agribisnis tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan ekonomi petani dengan cara pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

Isu strategis dalam pembangunan Pertanian di Kota Palangka Raya, antara lain sebagai berikut :

1. Rendahnya produksi dan produktivitas bidang pertanian
2. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana pertanian
3. Pengembangan kelembagaan pertanian.
4. Pengembangan kapasitas SDM di bidang Pertanian
5. Penyediaan pangan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH).
6. Penyediaan sarana dan prasarana pembenihan, produksi dan pasca panen di bidang pertanian.
7. Ketidakmerataan kesejahteraan dikarenakan pertanian kurang mendapatkan perhatian untuk investasi.
8. Kurang adanya keterkaitan antara sektor pertanian, perdagangan, jasa dan industri

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya sangat signifikan bagi SPOD Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya di masa datang. Suatu kondisi/ kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang antara lain :

1. Mensinkronkan dan mengintegrasikan program kegiatan ketahanan pangan yang meliputi sub sistem ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan dalam rangka mendukung percepatan penganeekaragaman pangan.
2. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi dalam pengembangan pangan berbasis potensi pangan lokal.
3. Mengembangkan kelembagaan Ketahanan Pangan dan peningkatan sumber daya aparatur dalam upaya pembinaan kepada petani/peserta pada desa mandiri pangan.
4. Mendorong tumbuhnya industri olahan pangan berbasis potensi lokal.

Strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman antara lain :

1. Meningkatkan pemberdayaan aparatur ketahanan pangan baik secara kuantitas maupun kualitas, gabungan kelompok tani, kelompok tani sebagai kemitraan pelaksanaan P-LDPM dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan bertumpu pada sumber daya lokal.
2. Meningkatkan fasilitasi petugas ketahanan pangan dalam sosialisasi pola konsumsi pangan yang memenuhi azas 3B dan aman, terutama yang berbasis potensi lokal.
3. Menjaga stabilitas harga pangan.



Strategi yang menggunakan kelemahan untuk memanfaatkan peluang antara lain :

1. Mengoptimalkan fungsi kelembagaan ketahanan pangan dan operator.
2. Meningkatkan sumberdaya aparatur guna mewujudkan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga berbasis pangan lokal.
3. Meningkatkan kerjasama dengan institusi terkait dan pihak swasta dalam integrasi dan sinkronisasi kegiatan bidang konsumsi dan penganeekaragaman pangan.
4. Memfasilitasi permodalan petani.
5. Mendorong terwujudnya kemandirian pangan masyarakat.

Strategi yang meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman antara lain :

1. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya pertanian penghasil pangan olahan dan pangan alternatif.
2. Memanfaatkan media informasi untuk mendukung ketahanan pangan masyarakat melalui produk pangan dalam negeri/ pangan lokal.
3. Melakukan kampanye dan promosi tentang pola konsumsi dan diversifikasi pangan secara terus menerus melalui berbagai media.
4. Mengembangkan pola konsumsi pangan beragam, bergizi, berimbang dan aman.
5. Membangun cadangan pangan masyarakat.

Selain pembangunan di bidang pertanian, pembangunan ketahanan pangan merupakan salah satu faktor kunci dalam pembangunan suatu bangsa. Setidaknya ada tiga isu strategis yang terkait dengan ketahanan pangan yaitu :

1. Pangan merupakan suatu kebutuhan dasar manusia, yang pemenuhannya menjadi hak asasi setiap individu.
2. Pangan merupakan basis bagi pengembangan sumberdaya manusia berkualitas, baik dalam arti biologis maupun intelektual.
3. Pemantapan kebutuhan pangan merupakan basis pembangunan ekonomi, dan kebutuhan nasional bagi suatu negara yang berdaulat.



## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Untuk mendukung tercapainya misi, telah ditetapkan berbagai tujuan dan sasaran yang sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya. Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan dan sasaran jangka menengah beserta indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.1.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Sesuai RPJMD

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2019	2020	2021	2022	2023
1.	Meningkatkan Perekonomian Daerah	Meningkatnya Sektor Industri Pengolahan	PDRB Sektor Pertanian	398.163.750.000	424.125.000.000	450.086.250.000	476.047.500.000	502.008.750.000

Tabel 4.1.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Organisasi Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE -				
				2019	2020	2021	2022	2023
1.	Meningkatkan Perekonomian Daerah	Terwujudnya Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani	104,75	104,78	104,78	104,78	104,78



## BAB. V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam mewujudkan visi dan menjalankan misi, tujuan serta pembangunan 5 (lima) tahun ke depan tersebut akan ditempuh melalui strategi dan arah kebijakan pembangunan. Strategi ini merupakan cara untuk mencapai tujuan dan cita-cita yang dikehendaki dalam pembangunan pertanian di Kota Palangka Raya dan kebijakan adalah tindakan yang diambil oleh Pemerintah untuk mencapai tujuan pada 5 (lima) tahun ke depan. Strategis dan arah kebijakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya merupakan suatu cara pandang untuk menentukan tindakan masa depan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia di Kota Palangka Raya. Strategi dan arah kebijakan tersebut merupakan terjemahan terhadap kondisi lingkungan internal dan eksternal Kota Palangka Raya yang disesuaikan dengan arahan kebijakan pembangunan nasional dan regional Provinsi Kalimantan Tengah. Strategi dan arah kebijakan erat kaitannya dengan ke mana arah Kota Palangka Raya akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun ke depan, bagaimana mencapainya dan langkah-langkah apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan. Strategi dan arah kebijakan ini merupakan hasil analisis situasi dan identifikasi isu strategis dan kecenderungan perkembangannya serta melakukan analisis atas kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi dalam pembangunan daerah sehingga dengan demikian melahirkan pemahaman terhadap substansi permasalahan yang dihadapi, dan kesadaran terhadap kemampuan dan kelemahan yang dimiliki. Strategis dan arah kebijakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tersebut dapat digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 5.1 Strategi dan Kebijakan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya

<b>VISI</b>	:	Terwujudnya Kota Palangka Raya Menjadi Kota Yang Maju, Rukun Dan Sejahtera Untuk Semua
<b>MISI 3</b>	:	Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Kota dan Masyarakat Daerah Pinggiran Smart Economy (Ekonomi cerdas)

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>KEBIJAKAN</b>
Meningkatkan Perekonomian Daerah	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Meningkatkan Produksi Bidang Pertanian dan Peternakan	Meningkatkan secara kuantitas dan kualitas hasil produksi maupun produktivitas atas komoditas pertanian dan peternakan





## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PENDANAAN

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan pada RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018 - 2023 yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi SOPD dalam pembangunan daerah. Untuk mempercepat implementasi pencapaian visi dan misi pemerintah daerah, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya menyusun rencana program, kegiatan serta indikator kinerja. Uraian program/ kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

#### 1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
- b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- d. Penyediaan Alat Tulis Kantor
- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerUndang – undangan
- g. Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah
- h. Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah
- i. Penyediaan Jasa Publikasi Surat Kabar dan Majalah

#### 2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

- a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- b. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
- c. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

#### 3. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

#### 4. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR

- a. Pendidikan dan Pelatihan Formal

#### 5. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

- a. Penyusunan Pelaporan Keuangan
- b. Penyusunan Program dan Rencana Kerja
- c. Inventarisasi Barang Milik Daerah/ Aset

#### 6. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
- b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- d. Penyediaan Alat Tulis Kantor
- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerUndang – undangan
- g. Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah
- h. Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah
- i. Penyediaan Jasa Publikasi Surat Kabar dan Majalah
- j. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor



- k. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
- l. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
- m. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
- n. Pendidikan dan Pelatihan Formal
- o. Penyusunan Pelaporan Keuangan
- p. Penyusunan Program dan Rencana Kerja
- q. Inventarisasi Barang Milik Daerah/ Aset

## **7. PROGRAM PENINGKATAN SARANA, PRASARANA DAN PENYULUHAN PERTANIAN**

- a. Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani
- b. Penyuluhan dan Pendampingan bagi Pertanian/Perkebunan/Perikanan
- c. Pengadaan Alsintan
- d. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian
- e. Peningkatan Komisi Penyuluhan
- f. Peningkatan Pembinaan di Pos Penyuluhan
- g. Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian
- h. PENAS KTNA
- i. PEDTA KTNA
- j. Peningkatan Kapasitas BPP Kota Palangka Raya
- k. Pengawasan Pupuk Bersubsidi
- l. Penyuluhan dan Pendampingan Bagi Pertanian/ Perkebunan/ Perikanan

## **8. PROGRAM KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERENER, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PETERNAKAN**

- a. Pengadaan Vaksin dan Obat Hewan
- b. Penanggulangan Rabies
- c. Pengawasan Produk Asal Hewan
- d. Surveillance Penyakit Avian Influenza
- e. Pengadaan Saprass Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan
- f. Pengelolaan dan Pengolahan Informasi Pasar Atas Hasil Produksi Peternakan
- g. Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT – RPH dan RPU

## **9. PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN PEMASARAN BIDANG PERTANIAN**

- a. Penyediaan Sarana Produksi Pertanian
- b. Monitoring dan Evaluasi dan Penyusunan Data Base Statistik Pertanian Kota Palangka Raya
- c. Adopsi Teknologi Pengelolaan Tata Air dalam Pengembangan Lahan Padi
- d. Penyediaan Bahan dan Peralatan Laboratorium Kultur Jaringan
- e. Penunjang dan Operasional TTP Banturung dan BBPP Tangkiling
- f. Penguatan Kelembagaan UPT BBPP Tangkiling
- g. Pengembangan Sistem Informasi Pasar
- h. Pengelolaan dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan
- i. Peningkatan SDM Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
- j. Peningkatan Keterampilan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura
- k. Bantuan Peralatan , Pengolahan dan Pasca Panen
- l. Promosi Hasil Pertanian
- m. Perbanyak Bibit Tanaman Hortikultura

## **10. PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN**

- a. Hari Pangan Sedunia (Tk. Provinsi dan Nasional)
- b. Pameran dan Promosi Dalam dan Luar Daerah
- c. Analisis Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan
- d. Pendampingan P2KP
- e. Pembinaan Kelembagaan Distribusi Pangan



- f. Penanganan Daerah Rawan Pangan
- g. Pemantauan Harga Pangan Pokok Daerah
- h. Pengembangan Desa Mandiri Pangan
- i. Pengembangan Diversifikasi Tanaman/Pangan
- j. Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
- k. Pengembangan Lumbung Pangan Desa

#### **11. PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN**

- a. Pengembangan Pakan Ternak
- b. Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat
- c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Peternakan
- d. Pengadaan dan Pendistribusian Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna



## BAB VII.

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi dinas pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat dicapai. Suatu indikator kinerja dinas dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja dinas berkenaan. Indikator kinerja dinas mengacu pada sasaran yang ingin dicapai. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mewujudkan Misi Pemerintah Kota Palangka Raya tahun 2013 - 2018 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		TAHUN 0	TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4	TAHUN 5	
A.	BIDANG PANGAN							
1.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	90,60	90,10	90,20	90,40	90,60	90,80	90,80
B.	BIDANG PERTANIAN							
1.	Nilai Tukar Petani	104,86	104,75	104,78	104,78	104,78	104,78	104,78
2.	Produktivitas Tanaman Pangan/ Padi (ton/ha)	2,90	2,56	2,56	2,58	2,58	2,58	2,58
3.	Populasi Ternak Sapi (ekor)	2.036	2.118	2.203	2.290	2.406	2.525	2.525
4.	Produksi Daging Sapi (Kg/Tahun)	1.102,2	1.157,3	1.215,2	1.275,9	1.339,7	1.406,7	1.406,7
5.	Produksi Sektor Perkebunan/ Kelapa sawit (ton/ha)	1.125,40	1.125,4	63.282	63.282	63.500	63.505	63.505
6.	Persentase Kelompok Tani Yang Dibina	70%	75%	80%	85%	90%	95%	95%
7.	Vaksin Hewan/ Rabies	6.000 Dosis	6.500 Dosis	7.000 Dosis	7.500 Dosis	8.000 Dosis	8.500 Dosis	8.500 Dosis
8.	Surveillance Avian Influenza	600 Sampel	600 Sampel	625 Sampel	650 Sampel	675 Sampel	700 Sampel	700 Sampel
9.	Sampel Produk Asal Ternak (sampel)	150 Sampel	150 Sampel	175 Sampel	200 Sampel	225 Sampel	250 Sampel	250 Sampel



## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) berkewajiban menjamin konsistensi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya Tahun 2018 - 2023 dengan Rencana Strategis Satuan Organisasi Perangkat Daerah (Renstra SOPD) Tahun 2018 - 2023. Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya Tahun 2018 - 2023 merupakan implementasi yang konsisten dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya (RPJMD 2018 - 2023).

Selanjutnya Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya Tahun 2018 - 2023 ini akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Satuan Organisasi Perangkat Daerah (Renja SOPD) mulai tahun 2018 hingga 2023. Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya Tahun 2018 - 2023 ini disusun sebagai pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Satuan Organisasi Perangkat Daerah (Renja SOPD) yang merupakan program dan kegiatan tahunan. Untuk itu, kegiatan-kegiatan yang diusulkan didalam Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya harus memiliki hubungan dan keterkaitan yang erat dengan Rencana Strategis ini.

Keberhasilan pelaksanaan renstra ini memerlukan dukungan dari semua pihak, baik itu masyarakat, pelaku usaha, eksekutif maupun legislatif, dan yang terpenting adalah peran aktif dari seluruh aparatur/ pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya.



[illegible]



TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TAHUN - 1		TAHUN - 2		TAHUN - 3		TAHUN - 4		TAHUN - 5		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/ PERKEBUNAN)	Terpenuhinya dokumen/ data NTP	115	12 Bulan	65.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pengembangan Sistem Informasi Pasar	Tersedianya Informasi Pasar	1 Tahun	1 Tahun	29.000.000	-	-		-	-	-	-	-	-	-
		Penyusunan Data Statistik Perkebunan	Dokumen Data ASAM dan ATAP Perkebunan	-	2 Dokumen	22.000.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pembinaan, Perngawasan dan Temu Teknis Usaha Di Bidang Perkebunan	Terlaksananya Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pemerintah	12 bulan	1 Tahun	14.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/ PERKEBUNAN	Nilai Tukar Petani	115	3 Kelompok Tani	91.240.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Promosi Hasil Produksi Pertanian Unggulan Daerah	Promosi Produk Sektor Pertanian Kota Palangka Raya	1 Tahun	3 Kelompok Tani	39.600.000	-	-		-	-	-	-	-	-	-
		Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan Unggulan Daerah	Terlaksananya Promosi Produk Perkebunan Unggulan Daerah	2 Kali Kegiatan	2 Kali Kegiatan	35.240.000										
		Peningkatan Keterampilan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Hortikultura	Peningkatan SDM dan Keterampilan Petani	1 Tahun	20 Orang	16.400.000	-	-		-	-	-	-	-	-	-
		PROGRAM PERLINDUNGAN KEBUN DAN TANAMAN	Meningkatnya luas perkebunan rakyat	115	5 Kecamatan	13.000.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pemantauan Kebakaran/ Gangguan Lahan dan Kebun serta HPT	Tersedianya Data Pantauan Kebakaran dan Gangguan pada lahan/Kebun	1 Tahun	5 Kecamatan	13.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN	Tercapainya Skor PPH	90	90,1	164.469.850	90,2	1.143.144.450	90,4	1.350.853.082	90,6	1.489.815.813	90,8	1.604.376.934	90,8	1.604.376.934
		Hari Pangan Sedunia (TK.Provinsi dan Nasional)	Memasyarakatkan Makanan yang beragam, Bergizi dan seimbang	2 Kali Kegiatan	1 Tahun	17.672.350	2 Kali Kegiatan	100.000.000	2 Kali Kegiatan	200.000.000	2 Kali Kegiatan	269.000.000	2 Kali Kegiatan	269.000.000	1 Tahun	269.000.000
		Pameran dan Promosi dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya Pamera dan Promosi Dalam dan Luar Daerah	2 Kali Kegiatan	1 Tahun	46.375.000	2 Kali Kegiatan	100.000.000	2 Kali Kegiatan	200.000.000	2 Kali Kegiatan	269.000.000	2 Kali Kegiatan	269.000.000	1 Tahun	269.000.000
		Analisis Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan	Tercapainya Informasi Kebutuhan Pangan	1 Dokumen	1 Tahun	6.132.000	1 Tahun	100.000.000	1 Tahun	100.000.000	1 Tahun	100.000.000	1 Tahun	100.000.000	1 Tahun	100.000.000
		Pendampingan P2KP	Terpenuhinya Pendampingan P2KP	15 Kelompok	1 Tahun	2.085.000	15 Kelompok	100.000.000	15 Kelompok	100.000.000	15 Kelompok	100.000.000	15 Kelompok	157.000.000	15 Kelompok	157.000.000
		Pembinaan Kelembagaan Distribusi Pangan	Terbinanya Kelembagaan Distribusi Pangan	2 Kegiatan	1 Tahun	11.300.000	1 Tahun	100.000.000	1 Tahun	100.000.000	1 Tahun	100.000.000	1 Tahun	157.000.000	1 Tahun	157.000.000
		Penanganan Daerah Rawan Pangan	Tertanganinya Daerah Rawan Pangan Secara Cepat dan Tepat	5 Kecamatan	1 Tahun	10.880.000	1 Tahun	100.000.000	1 Tahun	100.000.000	1 Tahun	100.000.000	1 Tahun	100.000.000	1 Tahun	100.000.000
		Pemantauan Harga Pangan Pokok Daerah	Diketahuinya Informasi Harga Pangan Oleh Ma	5 Kecamatan	1 Tahun	13.475.500	1 Tahun	93.144.450	1 Tahun	96.998.816	1 Tahun	96.998.816	1 Tahun	96.998.816	1 Tahun	96.998.816
		Pengembangan Desa Mandiri Pangan	Terbinanya kondisi desa miskin menjadi desamapan melalui pemberdayaan masyarakat	9 Kelurahan	1 Tahun	5.130.000	1 Tahun	100.000.000	1 Tahun	103.854.266	1 Tahun	103.854.266	1 Tahun	103.854.266	1 Tahun	103.854.266
		Pengembangan Diversifikasi Tanaman / Pangan	Lomba cipta menu berbahan dasar jagung dalam rangka diversifikasi pangan, hari pangan se dunia	2 Kali Kegiatan	1 Tahun	33.770.000	1 Tahun	150.000.000	1 Tahun	150.000.000	1 Tahun	150.000.000	1 Tahun	150.000.000	1 Tahun	150.000.000
		Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Terjaminnya Mutu dan Keamanan Pangan Masyarakat	1 Kali Kegiatan	1 Tahun	8.000.000	1 Tahun	100.000.000	1 Tahun	100.000.000	1 Tahun	100.000.000	1 Tahun	100.561.121	1 Tahun	100.561.121
		Pengembangan Lumbung Pangan Desa	Meningkatnya Fungsi Lumbung Pangan (Sosek)	5 Lumbung Pangan	1 Tahun	9.650.000	1 Tahun	100.000.000	1 Tahun	100.000.000	1 Tahun	100.962.731	1 Tahun	100.962.731	1 Tahun	100.962.731



[illegible]

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TAHUN - 1		TAHUN - 2		TAHUN - 3		TAHUN - 4		TAHUN - 5		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA, PRASARANA DAN PENYULUHAN PERTANIAN	Peningkatan Kelas Kelompok Tani	-	-	-	4%	5.998.000.000	4%	6.792.000.000	5%	7.340.800.000	5%	7.897.667.500	5%	7.897.667.500
		Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	Tebinanya Kelompok Tani Pertanian	1 Dokumen	1 Tahun	-	-	200.000.000	80%	250.000.000	80%	250.000.000	80%	300.000.000	80%	300.000.000
		Penyuluhan dan Pendampingan bagi Pertanian/ Perkebunan/ Perikanan	Meningkatkan Pengetahuan keterampilan dan Sikap (PKS) Petani. Pelaku Agribisnis dan Penyuluh/ LAKU	1 Dokumen	1 Tahun	-		200.000.000	80%	250.000.000	80%	250.000.000	80%	300.000.000	80%	300.000.000
		Pengadaan Alsintan	Tersedianya Alsintan untuk Kelompok Tani	5 Unit				250.000.000	80%	300.000.000	80%	350.000.000	80%	350.000.000		350.000.000
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pertanian	1 Tahun	1 Tahun		5 Kelompok Tani	3.698.000.000	5 Kelompok Tani	4.092.000.000	6 Kelompok Tani	4.490.800.000	6 Kelompok Tani	4.697.667.500	7 Kelompok Tani	4.697.667.500
		Pengawasan Pupuk Bersubsidi	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pupuk Bersubsidi	1 Dokumen	1 Tahun		80%	200.000.000	80%	250.000.000	80%	250.000.000	80%	300.000.000	80%	300.000.000
		Peningkatan Kelembagaan Komisi Penyuluhan	Terlaksananya Komisi Penyuluhan	1 Dokumen	1 Tahun	-	80%	200.000.000	80%	250.000.000	80%	250.000.000	80%	300.000.000	80%	300.000.000
		Peningkatan Pembinaan di Pos Penyuluhan	Terlaksananya Pembinaan di Pos Penyuluhan	14 Pos Penyuluh	1 Tahun	-	80%	200.000.000	80%	250.000.000	80%	250.000.000	80%	300.000.000	80%	300.000.000
		Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian	Tersedianya Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian	34 Penyuluh	1 Tahun	-	80%	200.000.000	80%	250.000.000	80%	250.000.000	80%	300.000.000	80%	300.000.000
		PENAS KTNA	Terlaksananya PENAS KTNA	-	-		1 Kegiatan	350.000.000		350.000.000	80%	400.000.000	80%	400.000.000		400.000.000
		PEDA KTNA	Terlaksananya PEDA KTNA Se Kalteng	-	-	-	-	300.000.000	-	300.000.000	80%	350.000.000	80%	350.000.000	1 Kegiatan	350.000.000
		Peningkatan Kapasitas BPP Kota Palangka Raya	Tersedianya Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian, Perkanan dan kehutanan	3 BPP	1 Tahun	-	80%	200.000.000	80%	250.000.000	80%	250.000.000	80%	300.000.000	80%	300.000.000
		PROGRAM KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERENEER, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PETERNAKAN	Hewan tervaksin	1 Paket	1 Paket	-	7.000 Dosis	953.962.500	7.500 Dosis	1.071.056.875	8.000 Dosis	1.073.556.875	8.500 Dosis	1.191.015.406	8.500 Dosis	1.291.015.406
		Pengadaan Vaksin dan Obat hewan	Tersedianya vaksin dan obat hewan (tahun)	1 Paket Obat dan Vaksin Hewan	-	-	7.000 Dosis	200.000.000	7.500 Dosis	200.000.000	8.000 Dosis	200.000.000	8.500 Dosis	200.000.000	8.500 Dosis	200.000.000
		Penanggulangan Rabies	Hewan tervaksin bebas penyakit rabies (ekor)	6000 Dosis	6000 Dosis	-	7.000 Dosis	100.000.000	7.500 Dosis	150.000.000	8.000 Dosis	150.000.000	8.500 Dosis	150.000.000	8.500 Dosis	250.000.000
		Pengawasan Produk Asal Hewan	Terlaksananya pengujian sampel produk asal ternak (Sampel)	1 Tahun	150	-	175	100.000.000	200	100.000.000	225	100.000.000	250	100.000.000	275	100.000.000
		Surveillance Penyakit Avian Influenza	Terdeteksi secara dini penyakit AI (Sampel)	550 Sampel	550 sampel	-	7.000 Dosis	150.000.000	7.500 Dosis	221.056.875	8.000 Dosis	221.056.875	8.500 Dosis	221.056.875	8.500 Dosis	221.056.875
		Pengadaan Sapras Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan	Terlaksananya pengujian sampel produk asal ternak (Sampel)	1 Paket	1 Paket	-	7.000 Dosis	200.000.000	7.500 Dosis	100.000.000	8.000 Dosis	100.000.000	8.500 Dosis	150.000.000	8.500 Dosis	150.000.000
		Pengelolaan dan Pengolahan Informasi Pasar Atas Hasil Produksi Peternakan	Tersedianya Dokumen Informasi Pasar Hasil Produksi Peternakan	12 Bulan	1 Tahun	-	1 Tahun	50.000.000	1 Tahun	100.000.000	1 Tahun	100.000.000	1 Tahun	150.000.000	1 Tahun	150.000.000
		Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT - RPH dan RPU	Tersedianya Sarpras RPH	1 Tahun	-	-	1 Tahun	153.962.500	1 Tahun	200.000.000	1 Tahun	202.500.000	1 Tahun	219.958.531	1 Tahun	219.958.531

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TAHUN - 1		TAHUN - 2		TAHUN - 3		TAHUN - 4		TAHUN - 5		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN PEMASARAN BIDANG PERTANIAN	Nilai Tukar Petani	-	-	-	104,75	1.975.000.000	104,78	1.825.000.000	104,78	2.091.107.814	104,78	2.550.000.000	104,78	2.550.000.000
		Penyediaan Sarana Produksi Pertanian	Tersedianya Sarana Produksi Pertanian bagi Kelompok Tani	-	-	-	5 Kec	275.000.000	5 Kec	400.000.000	5 Kec	491.107.814	5 Kec	500.000.000	5 Kec	500.000.000
		Monitoring dan Evaluasi dan Penyusunan Data Base Statistik Pertanian Kota Palangka Raya	Terlaksananya Pengendalian Fisik Kegiatan Pertanian	-	-	-	12 Bulan	100.000.000	5 Kec	100.000.000	5 Kec	200.000.000	5 Kec	200.000.000	5 Kec	200.000.000
		Adopsi Teknologi Pengelolaan Tata Air dalam Pengembangan Lahan Padi	Tersedianya Pengelolaan Tata Air dalam pengembangan Lahan Padi	-	-	-	12 Bulan	175.000.000	6 Kec	175.000.000		100.000.000	6 Ha	250.000.000	6 Ha	250.000.000
		Penyediaan Bahan dan Peralatan Laboratorium Kultur Jaringan	Tersedianya Bahan dan Peralatan Laboratorium Kultur Jaringan	-	-	-	UPT BBPP Tangkiling	275.000.000	UPT BBPP Tangkiling	200.000.000	UPT BBPP Tangkiling	200.000.000	UPT BBPP Tangkiling	350.000.000	UPT BBPP Tangkiling	350.000.000
		Penunjang dan Operasional TTP Banturung dan BBPP Tangkiling	Terpeliharanya Penunjang dan Operasional TTP Banturung	-	-	-	TTP Banturung	275.000.000	TTP Banturung	200.000.000	TTP Banturung	200.000.000	TTP Banturung	250.000.000	TTP Banturung	250.000.000
		Penguatan Kelembagaan UPT BBPP Tangkiling	Terlaksananya Kegiatan UPT BBPP Tangkiling	-	-	-	UPT BBPP Tangkiling	275.000.000	UPT BBPP Tangkiling	100.000.000	UPT BBPP Tangkiling	100.000.000	UPT BBPP Tangkiling	200.000.000	UPT BBPP Tangkiling	200.000.000
		Pengembangan Sistem Informasi Pasar	Tersedianya Informasi Pasar				12 Dokumen	100.000.000	Pasar dikota P.Raya	100.000.000	Pasar dikota P.Raya	100.000.000	Pasar dikota P.Raya	150.000.000	Pasar dikota P.Raya	150.000.000
		Pengelolaan dan Pengendalian Organisme Pengganggu tumbuhan	Menurunnya serangan HPT				5 Kec	100.000.000	5 Kec	100.000.000	5 Kec	100.000.000	5 Kec	100.000.000	5 Kec	100.000.000
		Peningkatan SDM Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	Terlaksananya Kegiatan peningkatan ketrampilan Petani				5 Kec	100.000.000	5 Kec	100.000.000	5 Kec	100.000.000	5 Kec	100.000.000	5 Kec	100.000.000
		Peningkatan Ketrampilan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura	Meningkatnya ketrampilan petani dan pelaku usaha hasil pertanian				4 Poktan	-	0	75.000.000	4 Poktan	100.000.000	4 Poktan	150.000.000	4 Poktan	150.000.000
		Bantuan Peralatan, Pengolahan dan Pascapanen	Tersedianya Peralatan, Pengolahan dan Pascapanen hasil pertanian				4 Poktan	-	0	75.000.000	4 Poktan	200.000.000	4 Poktan	100.000.000	4 Poktan	100.000.000
		Promosi Hasil Pertanian	Peningkatan pemasaran hasil pertanian				4 Poktan	-	0	100.000.000	4 Poktan	100.000.000	4 Poktan	100.000.000	4 Poktan	100.000.000
		Perbanyak Bibit Tanaman Hortikultura	Tersedianya Bibit Tanaman Hortikultura				12000 Bibit	300.000.000	3000 Bibit	100.000.000	3000 Bibit	100.000.000	3000 Bibit	100.000.000	3000 Bibit	100.000.000
		PROGRAM PENGELOLAAN, PENINGKATAN DAN PEMASARAN BIDANG PERKEBUNAN	Produksi sektor perkebunan (Kelapa sawit)	-	-	-	63.282	940.000.000	63.282	1.955.161.500	63.500	1.400.000.000	63.505	2.329.868.584	63.505	2.329.868.584
		Penyusunan Data Statistik Perkebunan	Tersedianya Data statistik Perkebunan	2 Dokumen	-	-	1 Tahun	100.000.000	1 Tahun	150.000.000	1 Tahun	100.000.000	1 Tahun	150.000.000	1 Tahun	150.000.000
		Pembinaan, Pengawasan dan Temu Teknis Usaha Di Bidang Perkebunan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan	2 Kegiatan	-	-	1 Tahun	100.000.000	1 Tahun	150.000.000	1 Tahun	100.000.000	1 Tahun	150.000.000	1 Tahun	150.000.000
		Pelatihan Penanganan Pasca Panen Tanaman Karet	Peningkatan Keterampilan Petani/ Pekebun	2 Kegiatan	-	-	1 Tahun	120.000.000	1 Tahun	150.000.000	1 Tahun	100.000.000	1 Tahun	150.000.000	1 Tahun	150.000.000
		Pengembangan Sistem Informasi Pasar	Tersedianya Informasi Pasar	12 Bulan	-	-	1 Tahun	100.000.000	1 Tahun	150.000.000	1 Tahun	100.000.000	1 Tahun	150.000.000	1 Tahun	150.000.000
		Pemantauan Kebakaran /Gangguan Lahan dan Kebun serta HPT	Pemantauan Kebakaran /Gangguan Lahan dan Kebun serta HPT	5 Kecamatan	-	-	1 Tahun	120.000.000	1 Tahun	150.000.000	1 Tahun	100.000.000	1 Tahun	150.000.000	1 Tahun	150.000.000
		Pelaporan Ketersediaan Pupuk dan Pestisida	Tersedianya Informasi Pupuk dan Pestisida Komoditi Perkebunan	2 Dokumen	-	-	1 Tahun	100.000.000	1 Tahun	150.000.000	1 Tahun	100.000.000	1 Tahun	150.000.000	1 Tahun	150.000.000
		Bantuan Bibit Tanaman Perkebunan untuk masyarakat	Terlaksananya Bibit Tanaman yang Berkualitas	Kopi 55.000, Kelapa 5.000, Karet 20.000	-	-	1 Tahun	100.000.000	1 Tahun	200.000.000	1 Tahun	100.000.000	1 Tahun	450.000.000	1 Tahun	450.000.000
		Pembangunan dan Peningkatan Jalan Produksi Perkebunan	Terbangunnya jalan produksi perkebunan	5 KM	-	-	1 Tahun	100.000.000	1 Tahun	503.000.000	1 Tahun	500.000.000	1 Tahun	779.868.584	1 Tahun	779.868.584
		Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan Unggulan Daerah	Promosi Produk Sektor Perkebunan Kota Palangka Raya	2 Kegiatan	-	-	1 Tahun	100.000.000	1 Tahun	152.161.500	1 Tahun	100.000.000	1 Tahun	100.000.000	1 Tahun	100.000.000
		Bantuan Pemeliharaan kebun masyarakat	Terpeliharanya Kebun Masyarakat	3 kelompok	-		6 Kelompok	100.000.000	9 Kelompok	200.000.000	12 Kelompok	100.000.000	15 Kelompok	100.000.000	1 Tahun	100.000.000